

Tak Ada Transaksi Rp 22,7 M

OJK Terus Monitor Kasus BTPN

SEMARANG- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Wilayah Regional 4 Jateng-DIY tak menemukan adanya transaksi senilai Rp 22,7 miliar pada kasus raibnya dana deposito Pemkot Semarang di BTPN. OJK sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak BTPN dan masih terus mendalami kasusnya.

■ Baca TAK ADA...hal 7

Deputi Direktur Perizinan Informasi dan Dokumentasi OJK Kantor Regional 4 Jateng-DIY,

Dian Danarsito menuturkan, pada tahun 2007 Pemkot Semarang membuka rekening di beberapa bank termasuk BTPN atas dasar MoU. Untuk di BTPN sendiri, rekening tidak ditempatkan pada satu deposito saja, melainkan dipecah menjadi beberapa deposito. "Masing-masing rekening isinya bervariasi, ada yang Rp 5 miliar, Rp 10 miliar, dan lain-lain. Adapun untuk jangka waktunya satu bulan dengan sistem ARO (Automatic Roll Over, *red*), sehingga kalau Pemkot tidak mencairkan otomatis diperpanjang," tuturnya. Menurutnya, untuk bunga bank sendiri masuk di rekening Giro, sehingga Pemkot memiliki dua item, yakni sertifikat deposito dan rekening giro.

Apabila bunga di rekening giro sudah cukup besar, mencapai Rp 1 miliar maka dimasukkan lagi deposito. "Dalam perjalanannya uang tersebut tidak selalu disimpan di BTPN.

Beberapa ada yang dipindahkan ke bank lain, namun tetap bank di wilayah Jateng melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS)," ungkapnya. Bahkan, lanjutnya, tercatat juga transaksi masuk dari bank lain ke BTPN.

Bahkan posisi outstanding tertinggi pernah mencapai angka Rp 57 miliar, kemudian terus turun hingga Januari tahun 2013 tersisa tiga bilyet. "Tercatat ada beberapa transaksi *cash* tapi hanya sedikit. Mayoritas menggunakan RTGS. Terakhir kali dipindahkan pada Januari tahun 2013 itu saldo tinggal Rp 514 juta, sedangkan rekening gironya

menyisihkan Rp 80 juta. Sejak Januari 2013 sampai sekarang tidak ada mutasi keuangan lagi," terangnya. Ditambahkan, pada akhir transaksi itu posisi uang yang ada di BTPN terdiri dari tiga bilyet, yakni Rp 400 juta, Rp 100 juta, dan Rp 14 juta plus rekening giro sekitar Rp 80 juta. Sejak saat itu tidak ada lagi transaksi hingga sekarang. "Itu hasil analisa kami, kami tidak menemukan bahwa BTPN pernah mengeluarkan deposito sebesar Rp 22,7 miliar. Karena yang dulu sudah dipecah, masuk dipindahkan ke bank lain," imbuhnya. Sebelumnya, hal sama diungkapkan Kepala OJK Regional 4 wilayah Jateng dan DIY Santoso Wibowo. "Dari hasil analisa yang dilakukan OJK, kami tidak menemukan bahwa BTPN pernah mengeluarkan deposito sebesar Rp 22 miliar atas nama Pemkot Semarang.

Dana (milik pemkot, *red*) yang ada di BTPN sudah dipecah dan dipindahkan ke bank lain melalui transaksi RTGS," tegas Santoso. Analisis OJK mencatat BTPN menerima dana milik pemerintah kota pada 2007 dengan adanya nota kesepahaman antara BTPN dan Pemkot Semarang yang diteken walikota saat itu. Terkait kasus ini, ditambahkan Dian Danarsito, OJK terus melakukan monitor dan mendalami secara lebih detail, perihal bagaimana dana milik Pemkot Semarang bisa hilang.

"Sampai saat ini kami sudah minta klarifikasi dari BTPN dan kami tengah menganalisa serta terus memantau perkembangan kasusnya," katanya, kemarin. Menurut Dian, jika diketahui ada kesalahan dari

pihak BTPN, maka akan ada sanksi administratif yang dijatuhkan. Namun demikian, pihaknya tetap menunggu hasil keputusan dari persidangan, yang memiliki kekuatan hukum tetap. "Mengenai sanksi kita masih menunggu proses hukum yang berjalan terlebih dahulu," ungkapnya. Dian mengakui, kasus raibnya uang deposito milik Pemkot Semarang di BTPN, bisa membuat buruk citra lembaga perbankan tersebut. Jika melihat kasus yang terjadi di BTPN Semarang, dikhawatirkan akan terjadi ketidakpercayaan publik sebagai nasabah terhadap perbankan. "Publik akan kesulitan untuk menyimpan dananya di bank, jika bank tersebut ternyata tidak aman," ujarnya. Ditambahkan, OJK selaku pengawas perbankan akan terus memberikan dorongan kepada perbankan di wilayah Jateng-DIY, agar bisa membangun kepercayaan publik. Salah satunya, dengan jaminan keamanan dana milik nasabah yang tersimpan.

Sementara, BTPN sendiri menegaskan bahwa bilyet deposito yang diklaim Pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar dan tersimpan di BTPN, tidak pernah terdapat dalam pencatatan bank. Communications Corporate Head BTPN Eny Yulianti mengungkapkan, bank telah melakukan audit investigasi independen terhadap adanya bilyet deposito yang disampaikan Pemkot Semarang. "BTPN memastikan di dalam pencatatan bank tidak terdapat dana tersebut," jelas Eny di kepada *Jateng Pos*, Senin (23/3). (aln/muz)